

**ANALISIS YURIDIS PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2379 K/Pid.Sus/2024)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

FADHIL FAHREZA

NPM : 71230123171

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

**ANALISIS YURIDIS PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2379 K/Pid.Sus/2024)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**FADHIL FAHREZA
NPM : 71230123171
Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana**

Medan, Oktober 2025

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Panca Sarjana Putra, SH.M.H)

(Dr. Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teori dan Konseptual	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konseptual.....	24
E. Keaslian Penelitian	24
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
2. Sumber Data.....	29
3. Alat Pengumpulan Data	31
4. Analisis Data.....	31
BAB II : PENGATURAN HUKUM PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	32
A. Tindak Pidana Korupsi.....	32
B. Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Perkara Korupsi	45
C. Perbedaan Unsur Kerugian Negara Yang Dimaksud Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korups	66

BAB III : PROSES PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	82
A. Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi	82
B. Penjatuhan Pidana Denda dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi	91
C. Kebijakan Pidana Denda Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi	103
BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2379 K/Pid.Sus/2024	109
A. Pidana Denda Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2379 K/Pid.Sus/2024	109
1. Kronologis Kasus	109
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	112
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	112
4. Amar Putusan	113
B. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2379 K/Pid.Sus/2024	115
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- ; *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Chaeruddin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Jakarta, 2018.
- Danil, Elwi, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Effendi, Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2016.
- Eliandi, Tito, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- ; *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016.

- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (normatif, teoritis, praktik dan masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2017.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.
- Ngani, Nico, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Poerwadarmina, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Prins, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Prodjokoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015.
- Pujijono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2017.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2018.
- Saibani. A, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Media Pustaka, Jakarta, 2014.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

- Semma, Mansyur, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2012.
- Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*,:Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2016.
- Simatupang, Nursariani & Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soemitro, Roni Hantijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013.
- ; *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Sumaryanto, A. Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Tresna, R. *Komentar HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2010.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor mengenai Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

C. Jurnal

Arhjayanti Rahim, Noor Asma, "Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Volume 3 No. 1- April 2020.

Bambang Hartono, "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian(Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Keadilan Progresif*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2021.

Dewi Ratnasari Rustam, *Kedudukan dissenting Opinion dalam perkara tindak pidana korupsi*, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.1 No. 1 Thn. 2022.

Diding Rahmat, "Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol VIII Nomor 1 April 2024.

Edi Setiadi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government", *Jurnal Mimbar*, No. 4 Th.XVI Okt. – Des. 2018.

Erdianto, "Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 Vol. 4, 2024.

Fatkurohman, "Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

Indung Wijayanto, "Kebijakan Pidana denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Volume 10 Nomor 2 Desember 2021.

Irsyad Zamhier Tuahuns, "Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1No. 1 Thn. 2021.

Mara Junjungan dan, Marlina, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6 No. 2/Desember 2023.

Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII Agustus, 2019.

Syaiful Bakhri, "Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi", *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 17 April 2020.

Wahyuningsih, "Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime", *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1 , Nomor 1 , Juni 2023..

D. Internet

Desca Lidya Natalia, "Ketua KPK: Korupsi Indonesia terstruktur dan masif", melalui <http://www.antaraneews.com>, diakses Kamis, 3 Juli 2025 Pukul 10.00 wib.

Hukum *Online*, "UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil, diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin 05 Mei 2025 Pukul 21.15 Wib.

Shinta Agustina, "Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Ancaman Hukuman Termasuk Yang Diperdebatkan", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin 05 Mei 2025 Pukul 21.00 Wib